

**IMPLEMENTASI PROGRAM REHABILITASI SOSIAL DALAM
PEMBERDAYAAN PENYANDANG DISABILITAS OLEH DINAS SOSIAL
DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA SAMARINDA**

**IMPLEMENTATION OF A SOCIAL REHABILITATION PROGRAM IN THE
EMPOWERMENT OF PERSONS WITH DISABILITIES BY THE
DEPARTMENT OF SOCIAL AND COMMUNITY EMPOWERMENT OF THE
CITY OF SAMARINDA**

Riza Korin Alfarabbi ^a, Kus Indarto ^a

^a Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas
Mulawarman, email: rizakorin13@gmail.com

^a Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas
Mulawarman, email: kus.indarto@fisip.unmul.ac.id

Abstract

Problem: *The implementation of the Social Rehabilitation Program for empowering people with disabilities is carried out by the Social and Community Empowerment Agency of Samarinda City. This program aims to provide a platform for people with disabilities by inspiring them, raising awareness of their talents, and encouraging their development. However, in the effort to empower people with disabilities, there are still some limitations, such as the uneven distribution of assistive devices like wheelchairs and canes. Additionally, there is a lack of outreach or socialization to the broader community to prevent discrimination against people with disabilities. Moreover, there are no facilities for independence training for people with disabilities, requiring them to be sent to other cities such as Surakarta, Cibinong, and Makassar for training, which is conducted only once a year.*

Purpose: *This research was conducted with the aim of analyzing the implementation of the Social Rehabilitation Program in empowering people with disabilities by the Samarinda City Social and Community Empowerment Service and identifying inhibiting factors in the implementation of the Social Rehabilitation Program in empowering people with disabilities by the Samarinda City Social and Community Empowerment Service.*

Methodology: *Research focus is based on Korten's theory, which consists of the compatibility between the program and the beneficiaries, the compatibility between the program and the implementing organization, the compatibility between the user group and the implementing organization, as well as the inhibiting factors in the implementation*

*Corresponding Author

email: rizakorin13@gmail.com

of the Social Rehabilitation Program in empowering people with disabilities by the Samarinda City Social and Community Empowerment Service. The type of research used is qualitative with a descriptive method. Data collection techniques are carried out through observation, interviews, and documentation. The analysis used is an interactive model developed by Miles, Huberman, and Saldana.

Results/Findings: research focuses on Korten's theory, which consists of the alignment between the program and its beneficiaries, the alignment between the program and the implementing organization, the alignment between the user groups and the implementing organization, as well as the factors hindering the implementation of the Social Rehabilitation Program in empowering people with disabilities by the Social and Community Empowerment Agency of Samarinda City. The type of research used is qualitative with a descriptive method. Data collection techniques include observation, interviews, and documentation. The analysis used is the interactive model developed by Miles, Huberman, and Saldana.

Paper Type: Descriptive

Keywords: Social Rehabilitation, Persons with Disabilities, Empowerment of Persons with Disabilities, Social Rehabilitation Program

Abstrak

Masalah: Implementasi Program Rehabilitasi Sosial dalam pemberdayaan penyandang disabilitas adalah pelaksanaan dari Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda yang dilakukan guna memfasilitasi wadah bagi kelompok penyandang disabilitas dengan cara menginspirasi, dan meningkatkan kesadaran akan bakat yang dimilikinya, serta mendorong perkembangannya. Namun, dalam usaha memberdayakan penyandang disabilitas, masih ditemukan adanya keterbatasan Dinas Sosial dalam pemberian alat bantu yang belum merata kepada penyandang disabilitas seperti kursi roda, tongkat, masih kurangnya penyuluhan atau sosialisasi kepada seluruh masyarakat untuk tidak mendiskriminasi penyandang disabilitas, belum adanya fasilitas untuk pelatihan kemandirian terhadap penyandang disabilitas sehingga harus dikirim keluar kota seperti Surakarta, Cibinung, dan Makassar yang dilaksanakan 1 tahun sekali.

Tujuan: Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis implementasi Program Rehabilitasi Sosial dalam pemberdayaan penyandang disabilitas oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda dan mengidentifikasi faktor penghambat dalam implementasi Program Rehabilitasi Sosial dalam pemberdayaan penyandang disabilitas oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda.

Metodologi: Fokus penelitian berdasarkan teori dari Korten yang terdiri dari kesesuaian antara program dengan pemanfaat, kesesuaian antara program dengan organisasi pelaksana, kesesuaian antara kelompok pengguna dengan organisasi pelaksana serta faktor penghambat implementasi Program Rehabilitasi Sosial dalam pemberdayaan penyandang disabilitas oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda. Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan metode deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dokumentasi. Analisis yang digunakan ialah model interaktif yang dikembangkan oleh Miles, Huberman dan Saldana.

Temuan/Hasil Penelitian: Hasil Penelitian mengenai implementasi Program Rehabilitasi Sosial dalam pemberdayaan penyandang disabilitas oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda sudah terlaksana namun belum maksimal, hal ini disebabkan masih ditemukan ketidaksesuaian dalam memberikan alat bantu dan masih belum tersosialisasikan dengan baik program yang diberikan kepada penyandang

disabilitas sebagai kelompok penerima manfaat. Namun dalam proses pelaksanaannya terdapat faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam mengimplementasikan Program Rehabilitasi Sosial seperti, kurangnya keterbukaan keluarga penyandang disabilitas dan adanya keluarga penyandang disabilitas yang pindah alamat tanpa memberi tahu Dinas Sosial.

Jenis penelitian: Deskriptif

Kata kunci Rehabilitasi Sosial, Penyandang Disabilitas, Pemberdayaan Penyandang Disabilitas, Program Rehabilitasi sosial

A. PENDAHULUAN

Manusia sebagai makhluk yang diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa dengan kondisi baik dengan kelebihan dan kekurangan pada setiap individunya. Setiap manusia mempunyai keunikan dan perbedaan dapat dilihat dari segi fisik maupun non fisik. Keberagaman yang dimiliki membuat manusia saling membutuhkan dan menjadi makhluk sosial. Setiap orang dalam hidup mereka, perlu saling membantu. Begitu pun terhadap penyandang disabilitas yang sama-sama mempunyai hak dan tanggung jawab setara dengan kelompok lain. Tidak ada lagi alasan bagi keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan sensorik yang mereka alami untuk menghalangi hak mereka atas kehidupan yang layak (Fauzi et al., 2022).

Rehabilitasi Sosial merupakan salah satu wujud dari hak kesejahteraan sosial yang dimiliki penyandang disabilitas. Dinas Sosial sebagai lembaga penanggung jawab yang dinaungi Kementerian Sosial yang dimana sebagai lembaga yang berperan dalam menetapkan standar Rehabilitasi Sosial di Indonesia (Vawitrie 2018). Salah satu cara untuk meningkatkan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas adalah melalui proses pemberdayaan.

Pemberdayaan kelompok penyandang disabilitas bertujuan agar keterlibatan mereka dalam berbagai aspek kehidupan sosial dapat

meningkat. Dengan demikian, upaya ini bertujuan untuk mengatasi dua masalah sekaligus, yakni mengurangi depedensi bagi penyandang disabilitas, serta menumbuhkan nilai sosial individu-individu masyarakat secara keseluruhan (Syobah 2018). Pemberdayaan pun menjadi salah satu solusi dalam membenahi permasalahan penyandang disabilitas.

Berlandaskan dari wawancara awal kepada Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas, peneliti mendapatkan informasi sebagai berikut. Pada tahun 2023 jumlah penyandang disabilitas di Kota Samarinda berjumlah 1.828 (Sumber Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda) orang ini tersebar di seluruh daerah Samarinda

Setelah penulis melakukan wawancara awal masih terdapat kendala yang ditemukan dalam usaha memberdayakan penyandang disabilitas adanya keterbatasan Dinas Sosial dalam pemberian alat bantu yang belum merata kepada penyandang disabilitas seperti kursi roda, tongkat, masih kurangnya penyuluhan atau sosialisasi kepada seluruh masyarakat untuk tidak mendiskriminasi penyandang disabilitas, belum adanya fasilitas untuk pelatihan kemandirian terhadap penyandang disabilitas sehingga harus dikirim keluar kota seperti Surakarta, Cibinung, dan Makassar yang dilaksanakan 1 tahun sekali.

B. TINJAUAN TEORI

1. Kebijakan Publik

Kebijakan publik adalah otoritas yang dimiliki pemerintah untuk menjalankan peran dan tanggungjawabnya terhadap masyarakat dan sektor bisnis. Pada dasarnya, kebijakan yang di rancang pemerintah dalam mengatur berbagai aspek dalam masyarakat dengan tujuan memenuhi kepentingan umum. Pengertian kebijakan (*policy*) merujuk pada prinsip atau tindakan yang ditetapkan sebagai penentu dalam proses pengambilan keputusan. Proses pembuatan kebijakan publik dimulai dengan menentukan masalah. Setelah itu, kebijakan dilaksanakan dengan tujuan menyelesaikan masalah yang timbul dalam lingkungan masyarakat (Mustari 2015).

Kebijakan publik ialah rangkaian keputusan yang saling berkaitan, termasuk penentu untuk tidak mengambil tindakan apapun, yang dibuat lembaga pemerintah atau pejabat dalam berbagai aspek tugas pemerintahan. Setiap kebijakan publik selalu melibatkan tiga elemen kunci, yaitu tujuan umum, sasaran khusus, dan strategi untuk mencapai sasaran tersebut (Wibawa dalam Sawir 2021).

Dapat dipahami bahwa kebijakan publik sebagai langkah yang diambil oleh pemerintah untuk dapat bertindak dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang hubungannya dengan memberikan dampak positif dalam menyelesaikan masalah yang terjadi dilingkungan masyarakat.

2. Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi adalah alat administrasi hukum yang meliputi berbagai elemen termasuk aktor, organisasi, prosedur, dan teknik yang mengkoordinasikan aktivitas untuk

menerapkan kebijakan agar hasil yang diinginkan dapat tercapai (Winarno dalam Sunarti, 2016).

Implementasi kebijakan ialah langkah-langkah yang diambil dalam merealisasikan tujuan yang telah ditetapkan. Biasanya, pelaksanaan kebijakan dilakukan oleh individu, lembaga pemerintahan, dan sektor swasta. Proses implementasi ini terkait dengan beragam kegiatan yang bertujuan untuk memastikan bahwa program berjalan dengan efektif. Dalam konteks ini, diperlukan administrasi yang memiliki keterampilan dalam mengorganisir dan mengelola kebijakan, menafsirkan, serta dalam penerapan kebijakan yang telah disetujui sebelumnya (Pasolong dalam Maani 2020).

Dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan publik sebagai langkah yang telah diambil atau diputuskan oleh pemerintah. Seringkali kebijakan ini dilakukan oleh pihak masyarakat, swasta, dan pemerintah yang bekerjasama untuk menerapkan kebijakan guna mencapai tujuan yang diinginkan. Proses ini mencakup berbagai kegiatan yang memastikan program berjalan efektif, memerlukan keterampilan dalam mengelola dan menerapkan kebijakan yang telah disetujui.

3. Implementasi Program

Implementasi dari program tentu menjadi sesuatu yang rumit, karena melibatkan berbagai faktor yang berinteraksi di dalam, termasuk faktor lingkungan yang cenderung selalu berubah. Syukur dalam Andani et al., (2019). Pada fase pelaksanaan program, ada dua kategori faktor yang berpengaruh pada keberhasilan, yaitu faktor pendorong (*facilitating conditions*) dan faktor penghambat (*impending*

conditions). Program menjadi unsur pertama yang harus ada untuk mencapai pelaksanaan kegiatan. Sementara itu, kelompok masyarakat yang menjadi target program adalah komponen berikutnya yang harus dipertimbangkan selama implementasi program untuk memastikan partisipasi dan penerimaan program, serta menciptakan perubahan serta meningkatkan taraf hidup.

Dapat disimpulkan bahwa Implementasi program melibatkan banyak faktor yang berinteraksi, termasuk faktor lingkungan yang dinamis. Keberhasilan pelaksanaan program dipengaruhi oleh dua kategori faktor, yaitu faktor pendorong (*facilitating conditions*) dan faktor penghambat (*impeding conditions*). Sementara kelompok masyarakat yang menjadi target program adalah komponen penting yang harus diperhatikan untuk memastikan partisipasi, penerimaan, dan keberhasilan program dalam menciptakan perubahan serta meningkatkan taraf hidup.

4. Penyandang Disabilitas

Penyandang disabilitas ialah seseorang dengan keterbatasan fisik, intelektual, mental, atau sensorik yang berlangsung dalam tempo waktu yang panjang, dan hal ini dapat membatasi peran mereka secara penuh dalam kehidupan sosial bersama individu lainnya, sesuai dengan hak-hak yang setara. Setiap manusia tentu mempunyai kemampuan yang tidak sama (Al-syakhshiyah 2022).

Menurut Goffman dalam Allo (2022), penyandang disabilitas ialah individu yang terbatas dan kurang dalam berkomunikasi dengan orang lain. Mereka dianggap tidak bisa melakukan apa pun yang

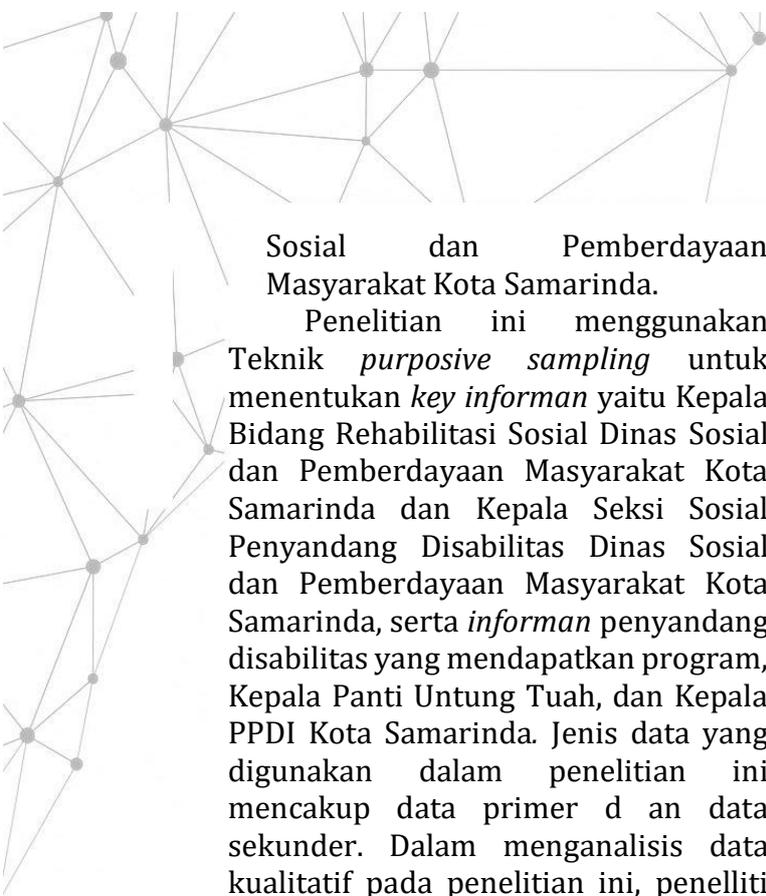
menyebabkan masalah, menurut lingkungan mereka. Karena keterbatasan dan stigma negatif yang diberikan orang lain, sehingga mereka berusaha untuk menghindari ketergantungan dengan orang lain.

Dapat disimpulkan bahwa penyandang disabilitas adalah orang-orang yang memiliki kemampuan yang berbeda. Tetapi penyandang disabilitas tetap memiliki posisi dan hak yang sama dengan masyarakat pada umumnya dibutuhkan perlakuan khusus agar penyandang disabilitas merasa nyaman dan di hargai. Penyandang disabilitas adalah individu dengan keterbatasan fisik, intelektual, mental, atau sensorik yang dapat membatasi peran sosial mereka. Mereka sering dianggap kurang mampu berkomunikasi dan kontribusi, menghadapi stigma negatif, dan berusaha menghindari ketergantungan pada orang lain.

C. METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Adapun yang menjadi fokus dari penelitian ini antara lain:

1. Implementasi Program Rehabilitasi Sosial dalam pemberdayaan penyandang disabilitas oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda: a. Kesesuaian antara program dengan pemanfaat, b. kesesuaian antara program dengan organisasi pelaksana, c. kesesuaian antar kelompok pengguna dengan organisasi pelaksana
2. Faktor penghambat dalam implementasi Program Rehabilitasi Sosial dalam pemberdayaan penyandang disabilitas oleh Dinas



Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda.

Penelitian ini menggunakan Teknik *purposive sampling* untuk menentukan *key informan* yaitu Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda dan Kepala Seksi Sosial Penyandang Disabilitas Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda, serta *informan* penyandang disabilitas yang mendapatkan program, Kepala Panti Untung Tuah, dan Kepala PPDI Kota Samarinda. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini mencakup data primer dan data sekunder. Dalam menganalisis data kualitatif pada penelitian ini, peneliti menggunakan teknik analisis data model interaktif dari Miles, Huberman, dan Saldana (2014) yang meliputi tahapan: pengumpulan data, kodensasi data, penyajian data, penarikan kesimpulan.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Implementasi Program Rehabilitasi Sosial dalam Pemberdayaan Penyandang Disabilitas oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda

Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Korten dalam Andani et al., (2019), keberhasilan implementasi program diukur berdasarkan sejumlah indikator yang diantaranya sebagai berikut:

a. Kesesuaian Antara Program dan Pemanfaat

Mengutip dari Korten dalam Andani et al., (2019), yang menjadi faktor penting adalah sebuah program harus memiliki kejelasan tujuan, manfaat, kegiatan serta kelompok sasaran agar dapat memberikan dampak atau hasil bagi penerima manfaat sesuai dengan tujuan. Namun,

apabila tidak berhasil maka implementasi akan berdampak pada tidak tercapainya tujuan yang telah ditetapkan dan kurang memberikan manfaat bagi kelompok sasaran.

Tujuan program ini adalah guna memfasilitasi wadah bagi kelompok penyandang disabilitas dengan cara menginspirasi, dan meningkatkan kesadaran akan bakat yang dimilikinya, serta mendorong perkembangannya. Namun, dalam pelaksanaannya, pemberian alat bantu tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh penyandang disabilitas, dan Dinas Sosial belum sepenuhnya melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan penyandang disabilitas. Kesesuaian antara program dan kebutuhan kelompok sasaran dapat ditingkatkan dengan lebih memahami dan merespon kebutuhan serta tingkat kesadaran terkait program.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sudah ada kesesuaian antara program dan pemanfaat, meskipun belum maksimal ditandai dengan masih ada ketidaksesuaian dalam memberikan alat bantu dan masih ada penyandang disabilitas yang belum terjangkau program sosialisasi dari Dinas Sosial.

b. Kesesuaian Antara Program dan Organisasi Pelaksana

Sesuai dengan Korten dalam Andani et al., (2019), yaitu keselarasan antara *job desk* yang diperlukan program dengan kapasitas organisasi pelaksana program. Koordinasi yang baik antara semua pihak terkait sangat penting untuk memastikan efisiensi dan efektivitas program.

Berdasarkan hasil penelitian, sumber daya manusia sudah mencukupi hal ini terlihat dalam

penerapan Program Rehabilitasi Sosial melibatkan pihak-pihak seperti Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI), serta ada pula relawan yang bergerak dalam bidang disabilitas seperti tenaga kesejahteraan sosial tingkat kecamatan (TKSK), pekerja sosial masyarakat (PSM), dan pendamping rehabilitasi sosial. Dengan ini, sumber daya manusia yang melaksanakan Program Rehabilitasi Sosial ini sudah tercukupi karena di bantu oleh relawan. Pembagian *job desk* dari masing-masing pihak yang terlibat juga telah ditetapkan agar mendukung pelaksanaan program yang selaras dengan peran dan tanggung jawab. Serta sumber daya manusia yang terlibat dalam Program Rehabilitasi Sosial ini telah memiliki kemampuan dan pemahaman untuk mampu menjalankan program, mengawasi jalannya program, serta berkomunikasi dengan penyandang disabilitas.

Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa program dan organisasi pelaksana sudah telah berjalan selaras dilihat dengan para pelaksana menjalankan tugasnya sesuai dengan *job desk* yang telah ditetapkan agar mendukung pelaksanaan program yang selaras dengan peran dan tanggung jawab. Serta Sumber daya manusia yang terlibat di dalam Program Rehabilitasi Sosial telah memiliki kemampuan dan pemahaman untuk mampu menjalankan program.

c. Kesesuaian Antara Kelompok Sasaran dengan Organisasi Pelaksana

Merujuk pada Korten dalam Andani et al., (2019), yaitu kesesuaian antara persyaratan yang ditetapkan oleh organisasi untuk menerima hasil

(*output*) dari program serta apa saja hal yang memungkinkan dijalankan oleh kelompok sasaran program.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa Program Rehabilitasi Sosial telah berjalan sesuai dengan harapan penyandang disabilitas sehingga mampu memenuhi sasaran yang sudah ditetapkan. Dinas Sosial juga telah mengatur syarat dan ketentuan yang wajib dipenuhi sebelum menerima dari Program Rehabilitasi Sosial, adapun syarat yang harus dipenuhi berupa KK dan KTP kemudian didata. Kemudahan ini bertujuan untuk memastikan bahwa penyandang disabilitas tidak merasa kesulitan dalam memenuhi persyaratan administratif guna mendapatkan bantuan yang mereka butuhkan. Dinas Sosial tidak memiliki kriteria khusus bagi penyandang disabilitas, namun berkomitmen untuk menyediakan dan menyesuaikan layanan berdasarkan kebutuhan dan permintaan penyandang disabilitas.

Berdasarkan pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa sudah adanya kesesuaian antara kelompok sasaran dengan organisasi pelaksana, bahwa kriteria dan persyaratan yang ditentukan sudah sesuai karena mudah untuk dipenuhi oleh penyandang disabilitas dan tidak terbelit-belit, sehingga penyandang disabilitas yang ingin mendapatkan bantuan tersebut dapat merasakan manfaatnya dan *output* yang ditawarkan sudah sesuai dengan kemampuan rata-rata penyandang disabilitas di Kota Samarinda.

2. Faktor Penghambat Implementasi Program Rehabilitasi Sosial dalam Pemberdayaan Penyandang Disabilitas oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda

Hal-hal yang menjadi faktor penghambat Implementasi Program Rehabilitasi Sosial dalam Pemberdayaan Penyandang Disabilitas oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda, diantaranya:

- 1) Kurangnya keterbukaan penyandang disabilitas yang enggan atau merasa malu untuk menyampaikan kondisi tersebut kepada pihak Dinas Sosial. Hal ini menjadi penghambat bagi Dinas Sosial dalam menjangkau atau memberikan bantuan kepada penyandang disabilitas. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Larasati (2020) yang berjudul “pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Terkait Penyelenggaraan Desa Inklusi dalam Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Di Kabupateb Sukoharjo” di faktor penghambatnya yang menjelaskan bahwa Perasaan minder dan malu yang dialami baik oleh Penyandang Disabilitas maupun keluarganya yang sering merasa takut dikucilkan. Stigma buruk dari masyarakat mendorong mereka enggan berpartisipasi, bahkan untuk melaporkan data ke Dinas Sosial. Hal ini menyebabkan keluarga yang memiliki anggota penyandang disabilitas cenderung ragu untuk melakukan pendataan, seperti pembuatam KTP maupun pencatatan KK.
- 2) Adanya keluarga penyandang disabilitas yang pindah alamat baru tanpa memberi tahu Dinas Sosial. Ketidadaan pemberitahuan ini dapat menyebabkankesulitan Dinas Sosial dalam pendataan dan memastikan bahwa penyandang disabilitas yang

pindah juga tetap menerima layanan yang mereka butuhkan.

E. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah penulis lakukan, dapat disimpulkan bahwa Implementasi Program Rehabilitasi Sosial dalam Pemberdayaan Penyandang Disabilitas oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda sebagai berikut: 1) Implementasi Program Rehabilitasi Sosial dalam Pemberdayaan Penyandang Disabilitas oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda sudah terlaksana namun belum maksimal. Hal ini dapat dilihat dari tiga indikator Korten sebagai berikut: a) Kesesuaian antara program dengan pemanfaat sudah berjalan, hanya saja belum maksimal dikarenakan masih terdapat ketidaksesuaian dalam memberikan alat bantu kepada penyandang disabilitas dan, masih belum tersosialisasikan dengan baik program yang diberikan kepada penyandang disabilitas sebagai kelompok penerima manfaat; b) Kesesuaian antara program dengan ornganisasi pelaksana sudah tercapai dengan baik, dimana tugas pelaksana yang menjalankan tugasnya sudah sesuai dengan *job desk* yang sudah ditetapkan. Serta sumber daya manusia yang terlibat di dalam Program Rehabilitasi Sosial telah memiliki kemampuan dan pemahaman untuk mampu menjalankan program; c) Kesesuaian antara kelompok sasaran dengan organisasi pelaksana sudah tercapai dengan baik. Syarat yang diberikan oleh organisasi pelaksana program kepada penyandang disabilitas untuk dapat *output* yang ditawarkan sudah sesuai dan mudah untuk dipenuhi dengan kemampuan

rata-rata penyandang disabilitas di Kota Samarinda. 2) Faktor penghambat dalam Implementasi Program Rehabilitasi Sosial Dalam Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda yaitu, Faktor lain adalah kurangnya keterbukaan penyandang disabilitas yang enggan atau merasa malu untuk menyampaikan kondisi tersebut kepada dinas sosial dan adanya keluarga penyandang disabilitas yang pindah alamat baru tanpa memberi tahu Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda.

Adapun beberapa saran yang diberikan dari penelitian tentang Implementasi Program Rehabilitasi Sosial dalam Pemberdayaan Penyandang Disabilitas oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda sebagai berikut: 1) Dinas Sosial diharapkan dapat berperan penting dalam mengkoordinasikan komunikasi dengan keluarga-keluarga penyandang disabilitas yang merasa enggan atau malu mengakui kondisi keterbatasan penyandang disabilitas. Hal ini dapat dilakukan dengan mengubah mindset atau pola pikir mereka agar tidak merasa malu atas keberadaan anggota keluarga yang merupakan penyandang disabilitas; 2) Dinas Sosial diharapkan dapat meningkatkan komunikasi dengan keluarga penyandang disabilitas melalui penyelenggaraan kampanye atau penyuluhan mengenai pentingnya memberitahukan perubahan alamat kepada pihak Dinas Sosial. Selain itu, pihak Dinas Sosial juga mempertimbangkan untuk menyediakan sarana komunikasi yang lebih mudah diakses, seperti layanan telepon atau platform online, agar keluarga penyandang disabilitas dapat

lebih mudah memberikan pemberitahuan mengenai perubahan alamat mereka; 3) Adanya kelemahan atau keterbatasan pada penelitian ini yakni kurangnya data pelatihan dan sosialisasi kepada para penyandang disabilitas yang dimiliki oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda. Maka dari itu, Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda dapat memperbaharui penyediaan data terkait pelatihan dan sosialisasi terhadap penyandang disabilitas terkait implementasi Program Rehabilitasi Sosial. Peneliti juga memberi saran kepada peneliti lainnya untuk dapat melanjutkan atau mengembangkan penelitian ini khususnya terkait kegiatan sosialisasi dan pelatihan bagi penyandang disabilitas.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-syakhshiyah, J. A. (2022). IMPLEMENTASI LAYANAN HIBALITASI DAN REHABILITASI DALAM PENINGKATAN PELAYANAN REHABILITASI SOSIAL BAGI PENYANDANG DISABILITAS. *Jurnal Ahwal Al-Syakhshiyah STAI Mempawah*, 1(2). Diunduh dari: <http://jurnal.staimempawah.ac.id/index.php/fafahamna/article/view/32/24>
- Andani, A. T. V., Setyowati, E., & Amin, F. (2019). Implementasi Program Pelayanan One Day Service dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Badan Pertanahan Nasional Kota. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, 5(3), 328–336. Diunduh dari: <https://doi.org/10.21776/ub.jiap.2019.005.03.9>
- Ebenhaezer Alsih Taruk Allo. (2022). Penyandang Disabilitas Di

- Indonesia. Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, 9(2), 807812. Diunduh dari <http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/nusantara/article/view/4327/0>
- Fauzi, A. R., Slamet, D. R., Utami, R., & Patadjenu, S. (2022). Peningkatan Layanan Kependudukan dan Catatan Sipil yang Inklusif Melalui Optimalisasi Fasilitas Penyandang Disabilitas di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tangerang Selatan. *JURNAL ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK*, 4(1), 867–892. Diunduh dari: <https://doi.org/10.56552/jisipol.v4i1.83>
- Kurniawan, W., & Maani, K. D. (2020). Implementasi Kebijakan Pembangunan Infrastruktur Jalan Di Kecamatan Tabir Selatan Kabupaten Merangin Dengan Menggunakan Model Donald Van Metter Dan Carl Van Horn. *Jurnal Manajemen Dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP)*, 1(4), 67–78. Diunduh dari: <https://doi.org/10.24036/jmiap.v1i4.95>
- Larasati, E.N. (2020). Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa Terkait Penyelenggaraan Desa Inklusi Di kabupaten Sukoharjo. *Res Publica*, 4(1), 13-26 Diunduh dari: <https://jurnal.uns.ac.id/respubli>
- ca/article/download/44622/28201
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana. (2014). *Qualitative data analysis. A Methods Sourcebook*, Edition 3. USA: Sage Publications.
- Mustari, Nuryanti. (2015). *Pemahaman Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi, Evaluasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: PT. Leutika Nouvaliter
- Sawir, Muhammad. (2021). *Ilmu Administrasi dan Analisis Kebijakan Publik Konseptual dan Praktik*. Sleman: CV BUDI UTAMA
- Sunarti, N. (2016). Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Melaksanakan Program Pembangunan. In *Ilmiah Ilmu Pemerintahan* (Vol. 2, Issue 2, pp. 786–796). Diunduh dari: <https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/moderat/article/view/2696>
- Syobah, S. N. (2018). Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Di Provinsi Kalimantan Timur. *NUANSA: Jurnal Penelitian Ilmu Sosial Dan Keagamaan Islam*, 15(2), 251. Diunduh dari: <https://doi.org/10.19105/nuansa.v15i2.2057>
- Vawitrie, Y. (2018). Implementasi Rehabilitasi Sosial Bagi Penyandang Disabilitas Di Kota Pekanbaru. *Jom Fisip*, 5(II), 1–13. Diunduh dari: <https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFSIP/article/download/20899/20223>